TATA KELOLA ORGANISASI DI LINGKUNGAN KECAMATAN BONTANG UTARA

TAHUN 2023

KECAMATAN BONTANG UTARA

DASAR PENGELOLAAN ORGANISASI

Berikut ini adalah Peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum dibidang Organisasi, diantaranya :

1. Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo 58, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah Kota Bontang;
6. Peraturan Walikota Bontang No 45 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan;
7. Keputusan Walikota Bontang Nomor 421 Tahun 2016 tentang pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota Kepada Lurah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Walikota Bontang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan